

TESIS

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA



OLEH:

NESIA TANUDJAYA
NPM 201320251034

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016

TESIS

**PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum**

OLEH :

**NESIA TANUDJAYA
NPM 201320251034**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

JUDUL TESIS

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA

OLEH :

NESIA TANUDJAYA
NPM 201320251034

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJI PADA TANGGAL 7 NOPEMBER 2016

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

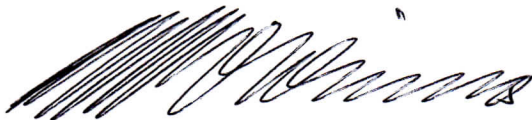
Pembimbing II



Dr. M. Ibrahim, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal: 7 Nopember 2016

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor: SKEP/013/XI/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1 Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

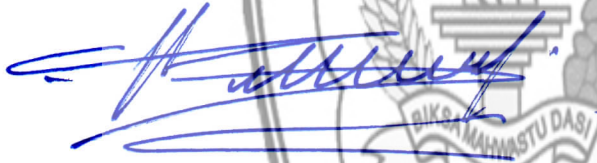
2. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : NESIA TANUDJAYA
NPM : 201320251034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH


Pembimbing II



Dr. M. Ibrahim, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : NESIA TANUDJAYA

NPM : 201320251034

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 7 Nopember 2016



(NESIA TANUDJAYA)



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NESIA TANUDJAYA
NPM : 201320251034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 November 2016
Yang menyatakan,


(NESIA TANUDJAYA)

"Hidup adalah perjuangan, kebahagiaan hanya bisa direngkuh dengan banyak pengorbanan"



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat diucapkan selain ucapan Syukur yang penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya selama penulis menyelesaikan penulisan Tesis berjudul “Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, M.M, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. I Made Widnyana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Raya.
4. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H, selaku Pembimbing Satu yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga sebagai dosen maupun praktisi untuk melakukan bimbingan kepada penulisan.
5. Bapak Dr. M Ibrahim, S.H., M.H, selaku Pembimbing Dua yang penuh perhatian mengarahkan dan melakukan koreksi dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Segenap keluarga tercinta, sahabat dan para kolega yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap tesis yang dihasilkan ini dapat menjadi sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya penerapan hukuman mati dalam perpektif pembaruan hukum pidana di Indonesia.



Jakarta, Juni 2016

Nesia Tanudjaya

ABSTRAK

Pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, Negara lah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimana penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia ?
- (2) Bagaimana eksistensi pidana mati dalam konsep rancangan undang- undang KUHP ?

Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal *research* (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), c) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP), d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, e) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, f) Undang - Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, g) Undang - Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001, h) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, i) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pidana mati merupakan hukum positif yang berlaku secara sah dan secara tegas diatur oleh Pasal 10 KUHP dan didukung undang-undang lain di luar KUHP yang penerapannya sebagai sarana terakhir dalam pemberian hukuman apabila pidana pokok yang lain diperkirakan tidak akan mampu lagi memperbaiki si pelaku dan diberlakukan bagi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat berat dan meresahkan serta melukai rasa keadilan masyarakat. Eksistensi Pidana mati dalam pembaharuan Indonesia masih diperlukan sebagaimana Pasal 63 RKUHP Nasional Tahun 2004 menyatakan : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, jelas bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Masih banyak kelemahan dalam pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan semakin maraknya berbagai tindak pidana yang merupakan kejahatan berat/luar biasa (*extra ordinary crime*), Pemerintah hendaknya segera membuat undang-undang khusus tentang pidana mati untuk melengkapi ketentuan dalam KUHP yang berlaku sekarang. Undang-undang tersebut, harus menetapkan parameter pidanaan (*anchoring the penalty scale*) sehingga dapat disusun berdasar tingkat kejahatan (*gravity of crimes*), sehingga fungsi pidana mati dapat menunjukkan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan yang paling berat/luar biasa (*extra ordinary crime*).

ABSTRACT

Pros and cons of capital punishment has long been happening in this country. The existence of the death penalty in Indonesia will continue in the future as in the draft Criminal Code, the death penalty is still one that maintained criminal sanctions to punish perpetrators. Addressing the problems and conflicts that occur in criminal law reform, the state that should take the policy in order to prevent a conflict escalating. The problems discussed in this study are: (1) How does the application of the death penalty law in the Indonesian criminal law? (2) How does the existence of the death penalty in the draft Penal Code draft law? The research in this thesis uses legal research (normative), in this type of research focuses on the assessment rules or norms of positive law, the criminal justice system in Indonesia, namely: a) the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, b) the Book Law Criminal Law (Penal Code), c) draft Law Criminal Law (RUKHP), d) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 22 Year 1997 on Narcotics, e) of the Constitution of the Republic of Indonesia No.5 of 1997 on Psychotropic Substances, f) Law - Law of the Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 on Human Rights, g) Law - Law of the Republic of Indonesia No.31 of 1999 on Corruption Eradication Jo RI Law No.20 of 2001, h) of the Constitution of the Republic of Indonesia No. 15 Year 2003 on Combating Criminal Acts of Terrorism, i) of the Act No. 23 of 2002 on Child Protection. The death penalty is positive law legally and expressly governed by Article 10 of the Criminal Code and supported other laws outside the Penal Code, its application as a means of last resort in the punishment if the criminal other basic is not expected to be able to further improve the perpetrator and enforced for extraordinary crime (extraordinary crime) were very heavy and troubling and wounded sense of justice. The existence of criminal death in Indonesia is still needed renewal as National RKUHP Article 63 of 2004 states: Criminal die is a principal punishment which is special and always threatened alternatively, it is clear that the death penalty is still required as part of the criminal sanctions which can be imposed by the judge. as a last resort to protect the society. There are still many weaknesses in providing guidance to the inmates at the Correctional Institution and the proliferation of various offenses are serious crimes / extraordinary (extraordinary crime), the Government should immediately make a special law on the death penalty to supplement the provisions in the Criminal Code that applies now. The law, must set the parameters of criminalization (anchoring the penalty scale) so it can be arranged on the level of crime (gravity of crimes), so that the function of the death penalty can show that these crimes are the most serious crimes / extraordinary (extraordinary crime) .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana Mati	22
1. Pengertian Pidana	22
2. Jenis Pidana.....	26
3. Kebijakan Hukum Pidana	28
4. Pengertian Pidana Mati.....	34

5. Tujuan Pemidanaan Pidana Mati di Indonesia	45
B. Penjatuhan Pidana Mati menurut KUHP	46
C. Penjatuhan Pidana Mati Terkait Dengan Hak-Hak Terdakwa	52
1. Pengertian Dan Kedudukan Terdakwa	52
2. Hak-Hak Terdakwa.....	54
3. Pidana Mati Dalam KUHP Dikaitkan Dengan Pasal 28 A Dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI 1945.....	63
 BAB III PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	
A. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perkara Pidana	78
B. Pelaksanaan Hukuman Pidana Mati di Indonesia	83
 BAB IV EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP	
A. Eksistensi Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP	89
B. Posisi / Status Pidana Mati Dalam Konsep RUU KUHP	94
C. Pengaturan Pidana Mati Dalam RUU KUHP.....	96
D. Pidana Mati Dilihat Dari Segi Filosofi Pemidanaan Indonesia ...	103
E. Kriminologi Dan Pengaturan Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia	106
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116

B. Saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

